

PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

THE EFFECT OF LAND AND BUILDING TAX ON LOCAL ORIGINAL REVENUE

Oleh:

Nadia Musti Rahayu¹, Ilah², Rita Patonah³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Galuh, Indonesia

^{1,2,3}Jl. R. E. Martadinata No. 150, Ciamis, Indonesia

Email : nadia.musti.rahayu@student.unigal.ac.id¹, ilah65@unigal.ac.id², ritadearly@gmail.com³

Sejarah Artikel: Diterima September 2025, Disetujui Oktober 2025, Dipublikasikan November 2025

ABSTRAK

Dalam satu dekade terakhir, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya secara umum belum mampu mencapai target yang direncanakan. Fenomena ini menjadi permasalahan pokok dalam penelitian, dengan indikasi bahwa salah satu faktor penyebabnya berkaitan dengan kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (1) mendeskripsikan dinamika perkembangan PAD Kabupaten Tasikmalaya; (2) menguraikan perubahan dan kecenderungan penerimaan PBB; serta (3) mengevaluasi pengaruh PBB terhadap PAD di wilayah tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan paradigma kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menerapkan Koefisien Korelasi Sederhana, Koefisien Determinasi, dan uji t untuk menguji signifikansi hubungan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa: (1) penerimaan PBB di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan pola yang berfluktuasi dari tahun ke tahun; (2) kondisi serupa juga terjadi pada penerimaan PAD yang mengalami variasi kenaikan dan penurunan; serta (3) secara statistik, kontribusi PBB terhadap PAD tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

In the past decade, the realization of Regional Original Revenue (PAD) in Tasikmalaya Regency in general has not been able to achieve the planned target. This phenomenon is the main problem in the research, with indications that one of the causative factors is related to the performance of Land and Building Tax (PBB) revenue. Based on this background, this study has three main objectives, namely: (1) describe the dynamics of the development of PAD in Tasikmalaya Regency; (2) outlining changes and trends in UN acceptance; and (3) evaluate the influence of the United Nations on PAD in the region. The research approach used is a descriptive method with a quantitative paradigm. Data analysis was carried out by applying the Simple Correlation Coefficient, Determination Coefficient, and t-test to test the significance of the relationship. The findings of the study show that: (1) UN revenues in Tasikmalaya Regency show a pattern that fluctuates from year to year; (2) similar conditions also occur in PAD receipts which vary in increase and decrease; and (3) statistically, the UN's contribution to PAD does not show a significant impact.

Keywords: Land and Building Tax, Regional Original Revenue.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah berfungsi sebagai otoritas yang menyelenggarakan pemerintahan

pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota dengan mandat mengatur dan mengurus kepentingan publik di wilayahnya. Tanggung

jawab yang diemban tidak hanya sebatas pada pengelolaan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan daerah secara strategis. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut (Elsye, 2020:3) "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah

dalam satu tahun anggaran". Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki berbagai jenis sumber pendapatan, salah satu diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah menurut (Rahman dalam Pohan, 2021:135) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi". Berikut ini merupakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya Periode tahun 2014-2023 :

Tabel 1:
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014-2023

No.	Tahun	Target	Realisasi	Prosen Realisasi (%)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	2014	152.337.814.551	154.255.170.573	101,26	-
2	2015	180.552.908.795	186.487.256.315	103,29	32,23
3	2016	200.013.369.975	216.107.592.671	108,05	29,74
4	2017	413.087.952.699	401.502.016.966	97,2	185,27
5	2018	247.955.999.553	248.420.386.329	100,19	-153,08
6	2019	267.426.198.085	288.290.693.896	107,8	39,87
7	2020	292.933.685.532,67	305.887.233.378,47	104,42	17,6
8	2021	428.182.630.516	375.030.394.259,50	87,59	69,14
9	2022	357.206.632.070	305.275.588.113,46	85,46	-69,75
10	2023	341.424.460.088	317.593.241.698,35	93,02	12,31
Rata-Rata		288,112	279,898	98,833	18,148

Sumber: BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun (2025)

Merujuk pada data yang disajikan dalam Tabel 1, bahwa selama sepuluh tahun terakhir, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya tidak mampu memenuhi target dan kurang dari 100%. Pada tahun 2015, 2016, 2018, 2019, dan 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah diatas 100% dan mengalami kenaikan setiap tahun. Sebaliknya, pada tahun 2017 capaian Pendapatan Asli Daerah tidak mampu memenuhi target karena hanya 97,20%. Fenomena yang sama juga terjadi di tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023 bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak tercapai dan cenderung mengalami penurunan.

Salah satu penyebab tidak tercapai target realisasi Pendapatan Asli Daerah sekaligus terjadinya penurunan penerimaan di Kabupaten Tasikmalaya diduga disebabkan oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 33 "Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan". Berikut ini merupakan data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tasikmalaya Periode tahun 2014-2023.

Tabel 1:
Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014-2023

No.	Tahun	Target	Realisasi	Prosen Realisasi (%)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	2014	17.170.774.937	17.643.988.606	102,76	-
2	2015	17.426.000.000	17.764.082.436	101,94	0,68
3	2016	17.670.775.000	18.222.009.172	103,12	2,58
4	2017	18.300.000.000	19.315.657.292	105,55	6
5	2018	18.520.000.000	20.700.315.695	111,77	7,17
6	2019	20.033.300.000	20.944.623.741	104,55	1,18
7	2020	22.500.000.000	21.850.556.136	97,11	4,33
8	2021	23.500.000.000	23.865.687.977	101,56	9,22
9	2022	29.100.000.000	30.656.686.326	105,35	28,46
10	2023	33.100.000.000	31.475.120.956	95,09	2,67
Rata-Rata		21,732	22,244	102,877	6,92

Sumber: BPKPD Kabupaten Tasikmalaya (2025)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan pola yang cukup fluktuatif namun cenderung sering melebihi target. Pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2022 realisasi PBB berhasil melampaui angka 100% dengan tren kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Adapun pada tahun 2020 capaian PBB tidak mampu memenuhi target karena hanya 97,11%. Fenomena yang sama juga terjadi ditahun 2023 dimana realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak tercapai dan cenderung mengalami penurunan.

Jika dibandingkan dengan data pada Tabel 1, terlihat fenomena menarik bahwa tingginya realisasi PBB yang melebihi 100% tidak selalu sejalan dengan peningkatan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Misalnya, pada tahun 2017, meskipun realisasi PBB melampaui target, PAD justru mengalami penurunan dengan capaian hanya sebesar 97,20%, sehingga tidak memenuhi target anggaran. Fenomena ini menjadi dasar yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana perkembangan penerimaan PAD di Kabupaten Tasikmalaya pada periode 2014–2023; (2) bagaimana perkembangan penerimaan PBB di Kabupaten Tasikmalaya pada periode 2014–2023; dan (3) apakah terdapat pengaruh PBB terhadap PAD di Kabupaten Tasikmalaya.

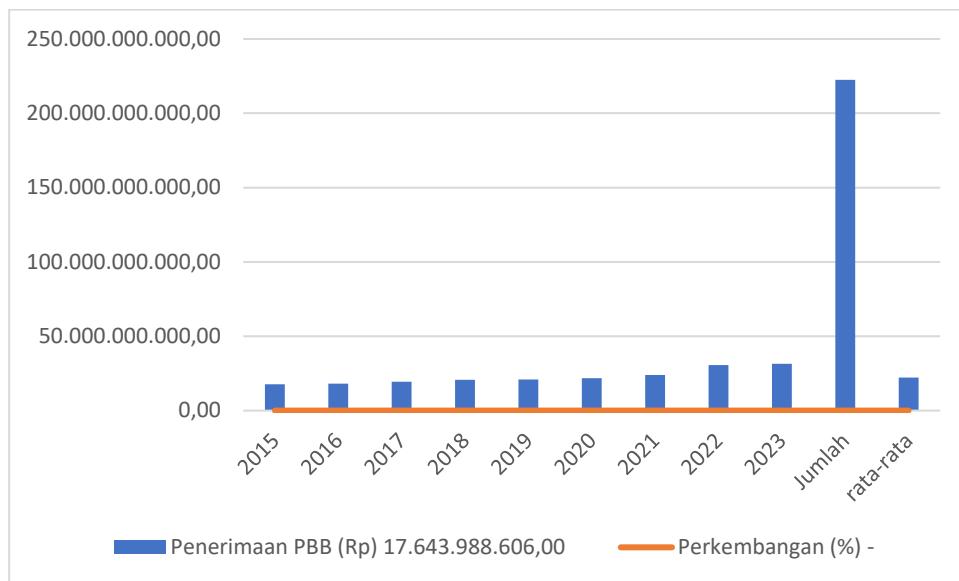
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini diarahkan untuk mencapai

beberapa tujuan, yaitu: mengidentifikasi dinamika perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya, menganalisis tren perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah tersebut, serta menilai sejauh mana PBB memberikan pengaruh terhadap PAD Kabupaten Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer yaitu Wawancara untuk memperoleh data yang peneliti butuhkan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal ilmiah, publikasi resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta referensi lain yang mendukung topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bngunan, perkembangan Pendapatan Asli Daerah, analisis koefisien korelasi sederhana, Analisis koefisien determinasi, serta pengujian signifikansi menggunakan uji t. Analisis koefisien korelasi sederhana digunakan untuk mengidentifikasi tingkat hubungan antara Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, koefisien determinasi dimanfaatkan untuk mengukur besarnya pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh tersebut secara statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Grafik 1:
Perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014-2023

Hasil pengamatan terhadap grafik menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tasikmalaya mengalami tren peningkatan selama periode sepuluh tahun terakhir. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, dengan kenaikan sebesar 28,46% dibandingkan realisasi tahun 2021. Sebaliknya, kenaikan terendah tercatat pada tahun 2015, yakni hanya sebesar 0,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan penerimaan PBB di Kabupaten Tasikmalaya per tahun mencapai 6,92%.



Grafik 2:
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Periode 2014-2023

Berdasarkan data pada grafik, perkembangan pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2014–2023 menunjukkan pola

fluktuatif, dengan periode kenaikan dan penurunan yang silih berganti. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017, dengan nilai kenaikan sebesar Rp 185.274.695.586,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, peningkatan terendah tercatat pada tahun 2023, yaitu hanya sebesar Rp 12.317.653.584,89.

Penurunan penerimaan PAD terjadi pada dua tahun tertentu, yakni tahun 2018 dan 2022, masing-masing sebesar Rp 153.081.630.637,00 serta Rp 69.754.806.146,04. Secara rata-rata, pertumbuhan PAD Kabupaten Tasikmalaya setiap tahun mencapai Rp 18.148.674.569,48.

Tabel 3:
Perhitungan Koefisien Korelasi Sederhana
Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Asli Daerah

		PBB	PAD
PBB	Pearson Correlation	1	0,457
	Sig. (2-tailed)		0,184
	N	10	10
PAD	Pearson Correlation	0,457	1
	Sig. (2-tailed)	0,184	
	N	10	10

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS interpretasi koefisien korelasi, nilai tersebut berada dalam rentang 0,400-0,559 yang menunjukkan kategori sedang. Artinya, terdapat hubungan yang sedang antara Pajak Bumi Bangunan (PBB) dengan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 6
Perhitungan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,457 ^a	,209	,110	74552755544,103

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh nilai Koefisien Determinasi sebesar 20,9%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (X) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,9% sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Tabel 7
Perhitungan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1	(Constant) 120452176979,233	112134726980,299			
	PBB 7,167	4,928	,457	1,074	,314
				1,454	,184

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,454. Sementara itu, pada tingkat signifikansi (α) = 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) = 8, nilai t tabel adalah 2,306. Karena nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel ($1,454 < 2,306$), maka hipotesis alternatif (Ha) dinyatakan ditolak.

PEMBAHASAN

Perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014-2023

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa selama periode 2014–2023, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa mekanisme pemungutan PBB di wilayah tersebut telah dilaksanakan dengan cukup efektif. Peningkatan paling signifikan tercatat pada tahun 2022, yakni mencapai 28,46% dibandingkan dengan capaian tahun 2021.

Kenaikan yang tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor utamanya adalah penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan oleh pemerintah daerah

secara berkala. Kenaikan NJOP mencerminkan peningkatan nilai pasar tanah dan bangunan, sehingga secara otomatis berpengaruh terhadap jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini sejalan dengan pendapat (Azhari dalam Hartono, 2025:1327) bahwa “Naiknya NJOP pada suatu objek pajak dapat mempengaruhi terhadap penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri”.

Peningkatan terkecilnya terjadi pada tahun 2015, yaitu hanya sebesar 0,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan realisasi pada tahun 2020 dan 2023 belum mampu memenuhi target dan kurang dari 100%. Walaupun Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masih terdapat sejumlah kendala yang menjadi penyebab belum tercapainya hasil penerimaan PBB secara optimal. Salah satu faktor utamanya adalah masih terbatasnya sosialisasi dan edukasi tentang manfaat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta prosedur pembayarannya juga menjadi faktor penghambat seperti banyak wajib pajak yang tidak mengetahui batas waktu pembayaran, tarif, atau prosedur pengajuan keringanan yang mengakibatkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menumpuk dan berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan pajak.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Seralurin dalam Khasanah, 2022:30) bahwa “sosialisasi pajak tidak hanya memberikan pemahaman tentang kewajiban pajak, tetapi juga menciptakan kesadaran akan konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak”.

Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014-2023

Hasil penelitian menunjukkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2014-2023 menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun berfluktuasi. Total Pendapatan Asli Daerah yang berhasil dihimpun selama sepuluh tahun mencapai Rp 163.338.071.125,35 dengan rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya sebesar Rp 16.333.807.112,54.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memiliki berbagai potensi lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sektor yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sektor hiburan seperti Situ Gede dan Gunung Galunggung yang menjadi bukti nyata potensi yang dapat dimaksimalkan untuk menambah penerimaan daerah. Kontribusi sektor hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari dua sumber utama, yaitu Retribusi tiket masuk dan Pajak Daerah.

Retribusi tiket masuk dikenakan kepada setiap pengunjung yang masuk ke kawasan wisata sebagai bentuk pembayaran atas pemanfaatan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pendapatan dari retribusi tiket masuk langsung disetorkan ke kas daerah dan menjadi salah satu komponen penting dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Kapang dalam Chaniago, 2024:104) bahwa “keberhasilan pengembangan pariwisata akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan regional, dimana pariwisata menjadi salah satu komponen utama”.

Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disumbang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti penyertaan modal kepada BUMD. Penyertaan modal ini dilakukan agar pemerintah daerah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMD sehingga bisa menambah pendapatan daerah. Pada tahun 2014, pendapatan dari penyertaan modal sebesar Rp 10.227.491.780,00 meningkat hingga Rp 29.200.666.163,00 pada tahun 2020. Namun, setelah itu nilainya kembali menurun. (Khoirunnisa & Zulkifli, 2025:160) menyatakan bahwa “Salah satu sumber yang cukup potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah hasil penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berikutnya disumbang dari Lain-Lain Pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu nilai tertingginya terjadi pada tahun 2017, yaitu mencapai 302.039.558.367,00 miliar. Sumber ini mencakup penerimaan dari denda pajak, jasa giro, keuntungan penjualan asset, dan lain-lain.

Sejalan dengan Pendapat (Damaryanti & Selvi, 2021:47) bahwa "Sumber Lain-lain Pendapatan daerah yang sah bukan dari pajak daerah dan retribusi daerah tetapi berasal dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan,penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan".

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selanjutnya disumbangkan dari Retribusi Daerah. Namun, realisasi penerimaan retribusi daerah ini justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan unit-unit pelayanan publik yang menjadi sumber retribusi seperti retribusi parkir, retribusi pasar, terminal dan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan Pendapat (Queen dalam Bake, 2022:1314) bahwa "permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan pemerintah daerah menjadi faktor yang menghambat peningkatan retribusi di pemerintah daerah".

Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan oleh struktur penerimaan pajak daerah yang terdiri dari berbagai komponen, dimana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya merupakan salah satu bagian di dalamnya. Sumber pendapatan dari sektor pajak daerah tidak hanya Pajak Bumi dan Bangunan tetapi bersumber dari jenis-jenis pajak lainnya seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak reklame yang umumnya memiliki potensi penerimaan lebih besar terutama di daerah dengan aktivitas ekonomi dan pariwisata yang tinggi. Damayanti (2020:333) menyatakan bahwa "beberapa variabel dari pajak daerah yang bisa mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan".

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebagai pendukung dan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya yang lebih aktif dan cepat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi di daerah. Sejalan dengan pendapat Utiarahman, dkk (2016:274) bahwa "Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan hanya bersumber pada pemasukan pajak PBB karena

masih banyak pajak daerah yang lain serta retribusi maupun lain-lain Pendapatan yang sah".

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2014–2023, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tasikmalaya mengalami pola fluktuatif dari tahun ke tahun. Kondisi serupa juga terlihat pada perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Analisis lebih lanjut mengindikasikan bahwa PBB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Tasikmalaya selama periode penelitian. Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan penambahan variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi PAD, sehingga hasil penelitian di masa mendatang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Elsye, Rosmery. 2020. *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*. Jatinangor: Alqaprint Jatinangor-Anggota IAKPI.
- Pohan, Chairil. 2021. *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Hartono, Nugroho, dkk. (2025). Pengaruh kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Undang-Undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (UU HKPD) terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Revenue*. [online]. Vol 5, No 2 (<https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/602>) diakses 2 Juni 2025.
- Khasanah, Niandari, dkk. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). *Proceding Auditing and Accounting Conference*, 11 Juni 2025, Universitas Politeknik YKPN Yogyakarta (<https://jurnal.iapi.or.id/index.php/prosing/article/download/83/59/237>)

- Chaniago. (2024). *Peranan Sektor Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kawasan Indonesia Timur.* Media Ekonomi. [Online]. Vol 32, No.1 (<https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/medek/article/download/19797/12171>) diakses 21 Juni 2025.
- Khoirunnisa, Zulkifli. (2025). *Efektivitas Penyertaan Modal dan Kontribusi Laba PT.Bank BPD DIY Terhadap PAD Provinsi DIY.* Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi). [online]. Vol 5, No. 1 (<https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB/article/download/957/890/4784>) diakses 12 Juni 2025.
- Damayanti. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.* Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 3, 12 Juni 2025, Universitas Islam Sultan Agung (<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/9834/4872>)
- Bake, Yusuf, dkk. (2022). *Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Di Kota Kendari.* Journal Publicuho. [online]. Vol 5, No. 4 (<https://jurnalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/78/58/749>) diakses 12 Juni 2025.
- Utiarahman, Walewangko, dkk. (2016). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon).* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. [online]. Vol 16, No. 2 (https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAK/article/view/9789_1) diakses 12 Juni 2025.